

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka

Influence of Information Technology Utilization, Budgeting Participation and Supervision on Accountability of Village Fund Management in Sindang District of Majalengka Regency

Wulan Riyadi^{1*}, Engkun Kurnadi²

¹²Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Majalengka, Majalengka, Indonesia.

*E-mail: Wulan.saparinda@unma.ac.id

Naskah masuk: 2020-08-10

Naskah diperbaiki: 2020-03-11

Naskah diterima: 2020-14-11

ABSTRAK

Prioritas negara saat ini salah satunya dengan pembangunan desa. Untuk mewujudkan pembangunan desa tersebut salah satu upaya pemerintah yaitu dengan pemberian dana desa langsung dari APBN untuk dikelola secara mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi penganggaran dan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Jenis data dalam penelitian ini yaitu dari data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada aparatur desa Se-Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka dengan teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. Metode penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jumlah sampel sebanyak 56. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Partisipasi penganggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pengawasan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kata Kunci: Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, Pengawasan dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

ABSTRACT

One of country priority is village constructions. To create that construction one of the government effort is give village fund that directly taken from APBN managed by society independently. This research aims to explain and analyze the influence of utilization of information technology, budgeting participation, and supervision againts the accountability of the manajement of the village. The type of research data was obtained by primary data, the questionnaires was distributed to village officials in the Village District of Sindang Majalengka with a purposive sampling method this research method uses quantitative reseaech method with a total sample of 56. The result of this study indicate that the use utilization of information technology does not affect the accountability of the manajement of the village. Budgeting participation affects the accountability of the manajement of the village. Supervision does not affect the accountability of the manajemen of the village.

Keywords: Utilization of Infrmation Technology, Budgeting Participation, Supervision and Accountability of The Manajement of The Village

1. PENDAHULUAN

Latarbelakang

Indonesia saat ini telah memposisikan desa sebagai fokus utama pembangunan. Salah satu upaya untuk meningkatkan pembangunan di desa yaitu dengan pemberian dana desa langsung dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk dikelola secara mandiri oleh masyarakat desa untuk meningkatkan pembangunan dan taraf hidup masyarakat dari pinggiran dan desa-desa. Anggaran yang mengalir ke kas desa terbagi kedalam 2 (dua) mekanisme penyaluran, yang pertama bersumber dari APBN dana transfer ke daerah secara bertahap yang dikenal dengan Dana Desa dan mekanisme dana transfer melalui APBD kabupaten/kota berdasarkan PP No. 47 tahun 2015 dialokasikan 10% oleh pemerintah daerah untuk disalurkan ke kas desa secara bertahap yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD) setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Secara nasional, pemerintah telah mengalokasikan anggaran dana desa dengan nilai yang cukup fantastis untuk desa yang skala pemerintahan terkecil. Berdasarkan data pada Kementerian Keuangan RI (Nota Keuangan), pemerintah telah mengalokasikan dana desa melalui APBN pada tahun 2015 sebesar Rp. 20,77 Triliun, tahun 2016 sebesar Rp. 47,00 Triliun, tahun 2017 sebesar 60,00 Triliun, tahun 2018 sebesar Rp. 60,00 Triliun. pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembiayaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Indonesia memiliki 74.754 desa yang dilakukan secara bertahap dalam pengalokasian dana desa. Dalam penyalurannya dana desa dilakukan secara

bertahap. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang hanya dibagi menjadi dua tahap, perubahan pola tersebut dikarenakan untuk mempertimbangkan perubahan skema dana desa yang lebih menekankan pada padat karya tunai. Padat karya tunai merupakan program pemerintah dalam mengatasi permasalahan dalam penurunan kemiskinan dan ketimpangan salah satunya dengan memanfaatkan dana desa.

Diketahui bahwa alokasi APBN merupakan salah satu sumber pendapatan bagi desa. Setelah diberlakukan pada tahun 2015 dimana hal ini tergolong baru maka pengawasan dari pelaksanaan dana desa yang bersumber dari APBN harus dijaga dengan ketat dan alokasi keuangan bagi desa tersebut, mengingat jumlah yang dialokasikan terbilang cukup besar, jika pengelolaannya tidak benar dan baik sesuai aturan maka akan menimbulkan masalah (Rizkita, 2018). Secara administratif pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat terdiri dari 18 (delapan belas) pemerintah Kabupaten dan 9 (sembilan) pemerintah Kota dengan Bandung sebagai Ibu Kota Provinsi. Pemerintah Kabupaten dan Kota membawahi Pemerintah Kecamatan dan Desa Kelurahan. Provinsi Jawa Barat memiliki 624 Kecamatan, 654 Kelurahan, 5.312 Desa. Sedangkan dalam penelitian kabupaten yang diambil merupakan Kabupaten Majalengka di Kecamatan Sindang, desa yang berada di Kecamatan Sindang merupakan desa yang memperoleh anggaran Dana Desa dari pemerintah pusat yang berjumlah 7 desa. Berikut ini adalah rincian Dana Desa pada desa Se-Kecamatan Sindang.

Tabel 1
Rincian Alokasi Dana Desa Kecamatan Sindang
Tahun 2018-2019

No	Nama Desa	Tahun 2018	Tahun 2019	Keterangan kenaikan
1	Desa Pasirayu	1.511.070.693	1.827.970.290	20,9%
2	Desa Sindang	1.599.689.614	1.864.008.713	16,5%
3	Desa Sangkanhurip	1.466.206.921	1.831.309.000	24.9%
4	Desa Garawastu	1.452.264.754	1.674.469.500	12.9%
5	Desa Indrakila	1.497.632.152	1.872.351.070	25%
6	Desa Gunungkuning	1.424.094.768	1.880.894.400	32%
7	Desa Bayureja	1.459.893.944	1.695.259.515	16.2%
8	Kec.Sindang	10.410.852.846	12.646.262.488	21.5%

Sumber : *Data diolah dari Desa Se-Kecamatan Sindang, 2019*

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa terjadi kenaikan Alokasi Dana Desa pada tahun 2018-2019 sebesar 21.5%, yang digunakan dalam program masing-masing desa yaitu pemberdayaan masyarakat 8,5%, pembangunan desa 61,5%, pembinaan kemasyarakatan 3,8% dan penyelenggaraan pemerintah desa 26,2%.

Dapat dilihat bahwa Dana Desa yang bersumber dari APBN terus mengalami peningkatan. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) mengatakan alasan pemerintah meningkatkan Dana Desa setiap tahunnya karena pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal tersebut sejalan dengan cita-cita Presiden Jokowi membangun Indonesia dari pinggiran(Rizkita,2018).

Anggaran Dana Desa yang diperoleh oleh pemerintah desa tersebut membutuhkan pengelolaan yang baik sehingga tidak terjadinya penyelewengan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan ada 14 potensi permasalahan dalam pengelolaan dana desa. Sebanyak 14 potensi permasalahan itu ditemukan dalam beberapa aspek, yaitu aspek regulasi dan kelembagaan, aspek tata laksana, aspek

pengawasan, dan aspek sumber daya manusia. Pada permasalahan tersebut membuktikan bahwa Dana Desa yang dialokasikan dan di peruntungkan penggunaannya tidak untuk membiayai program. Mengakibatkan berimplikasi terhadap belum terpenuhinya maksud atau tujuan dari pemerintah desa dan harapan masyarakat desa (Rizkita, 2018).

Fenomena yang terjadi saat ini pada pemerintah desa yaitu kasus kebocoran anggaran dana desa di Kabupaten Majalengka sebesar Rp. 2 miliar dari total dana yang dikucurkan ke desa sebesar lebih dari 200 miliar. Penyebab kebocorannya akibat beberapa faktor, diantaranya karena pajak yang belum dibayarkan, ada yang kekurangan volume pekerjaan bagi desa yang mengerjakan pembangunan fisik namun sebagian ada yang belum mempertanggungjawabkan keuangan yang diterimanya. Sementara uang di kas telah diambil dan dipergunakan, namun penggunaannya tidak jelas administrasinya serta bukti fisik dari apa yang telah dikerjakan. Padahal setiap uang yang dikeluarkan dari kas daerah atau kas desa, harus jelas betul pertanggungjawaban administrasi keuangannya termasuk bukti fisik dari apa yang telah dilakukan. Demikian

juga dengan pembangunan ekonomi desa, harus jelas penerimaannya, jenis usahanya dan kondisi usahanyapun harus jelas (Pikiran Rakyat, 2019).

Pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari akuntabilitas, Riyanto (2015) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai efisiensi, efektivitas, dan reabilitas dalam pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan, mulai dari perencanaan, hingga realisasi atau pelaksanaannya.

Untuk mendukung akuntabilitas pengelolaan dana desa pemanfaatan teknologi informasi diperlukan dalam pelaporan keuangan yang andal. Menurut Suparman (2014: 3) pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik selain itu pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat. Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi berupa komputer membantu aparatur desa dalam mengelola dokumen-dokumen desa secara keseluruhan.

Faktor selanjutnya yang tidak kalah penting dalam mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah partisipasi penganggaran. Surjawen (2015: 29)

mengatakan bahwa partisipasi penganggaran adalah prinsip dimana bahwa setiap warga Negara desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa di mana mereka tinggal, keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung.

Selain pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi penganggaran yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, yaitu pengawasan yang merupakan faktor penentu kegiatan organisasi berjalan efektif dan efisien. Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja actual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber data organisasi atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintahan (Anggraeni, 2017: 7).

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dwi Sapartiningsih, dkk (2018) menyatakan bahwa Kompetensi Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran dan Pengawasan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan penelitian yang dilakukan oleh Siti Umaira, dkk (2019) menyatakan bahwa Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pengawasan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan

Dana Desa. Dengan adanya penelitian-penelitian terdahulu maka membuat peneliti tertarik untuk mengembangkan penelitian tersebut dengan objek yang berbeda yaitu dalam penelitian ini mengambil objek pada Desa Se-Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Majalengka”.

Hipotesis

- H1 : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
H2 : Partisipasi penganggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
H3 : Pengawasan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian melalui pendekatan deskriptif verifikatif dan jenis penelitian didukung oleh survey sampel dengan data mengenai faktor yang terkait variabel penelitian. Sifat penelitian adalah penelitian penjelasan (explanatory research) yang berkaitan dengan kedudukan variabel yang diteliti serta pengaruh antara satu variabel dengan variabel penelitian. Variabel yang dibutuhkan adalah Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, Pengawasan dan Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa.

Variabel Independen

Pemanfaatan Teknologi Informasi (X1)

Pemanfaatan teknologi informasi adalah penggunaan secara optimal dari komputer

(mainframe commerce, mini, micro), perangkat lunak (software), database, jaringan (internet, intranet), electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi untuk kegiatan penyusunan laporan keuangan pada Pemerintah Desa di Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka.

Partisipasi Penganggaran (X2)

Partisipasi penganggaran adalah proses pembuatan anggaran yang disusun dengan kerjasama dan partisipasi penuh dari seluruh manajer pada segala tingkatan (Garrison, 2013).

Pengawasan (X3)

Pengawasan adalah tindakan pemantauan atau pemeriksaan kegiatan pemerintah desa untuk menjamin pencapaian tujuan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya dan melakukan tindakan korektif yang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada sebelumnya.

Variabel Dependen

Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan kepala desa kepada Bupati berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(pencapaian unjuk kerja yang maksimal) dengan efisiensi salah satu masukan (tenaga kerja) yang mencakup kuantitas, kualitas dalam satuan waktu tertentu”.

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah aparaturnya desa dan lembaga perwakilan masyarakat di Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka yaitu sebanyak 140 orang yang terdapat pada 7 desa, dengan penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling sebanyak 56 orang yaitu Kepala Desa 1 orang, Sekertaris 1 orang, Kepala Urusan Keuangan 1 orang, Kepala Urusan Pembangunan 1 orang, BPD 2 orang, dan LPM 2 orang dari setiap desanya.

Teknik Analisis Data

Jenis Metode analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden dan variabel penelitian. Menganalisis secara deskriptif yaitu dengan bantuan tabel dalam bentuk jumlah dan prosentase, dengan ketentuan pembobotan yang telah ditentukan yaitu berkisar 1 sampai 5 menggunakan skala Likert, sehingga dapat diketahui klasifikasi keberadaan dari masing-masing variabel penelitiannya. Dalam menentukan klasifikasi rentang (interval) tersebut, mengacu pada ketentuan dengan formula :

Selanjutnya di buat skala penilaian untuk membuat tingkat persepsi mengenai variabel-variabel yang diteliti. Rata-rata tertinggi adalah 5 dan rata-rata terendah adalah 1.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis korelasi dengan didahului uji instrument penelitian.

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji hipotesis secara parsial (uji t).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Tabel 2

Interval X1

Kriteria Penilaian	Interval
Sangat Tinggi	2.588,2 – 3.080
Tinggi	2.095,4 – 2.587,2 → 2.604
Sedang	1.602,6 – 2.094,4
Rendah	1.109,8 – 1.601,6
Sangat Rendah	616 – 1.108,8

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan data hasil kuesioner yang terdiri dari 11 (sebelas) pernyataan untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi diperoleh total skor sebesar 2.604. hal ini menunjukkan bahwa hasil penelitian mengenai pemanfaatan teknologi informasi berkriteria sangat tinggi.

Tabel 3

Interval X2

Kriteria Penilaian	Interval
Sangat Tinggi	1.647,4 – 1.960
Tinggi	1.333,8 – 1.646,4 → 1.679
Sedang	1.020,2 – 1.332,8
Rendah	706,6 – 1.019,2
Sangat Rendah	392 – 705,6

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan data hasil kuesioner yang terdiri dari 7 (tujuh) pernyataan untuk variabel partisipasi penganggaran diperoleh total skor sebesar 1.679. hal ini menunjukkan bahwa hasil penelitian mengenai partisipasi penganggaran berkriteria sangat tinggi.

Tabel 4

Interval X3

Kriteria Penilaian	Interval
Sangat Tinggi	1.882,6 – 2.240 → 1.898
Tinggi	1.524,2 – 1.881,6
Sedang	1.165,8 – 1.523,2
Rendah	807,4 – 1.164,8
Sangat Rendah	448 – 806,4

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan data hasil kuesioner yang terdiri dari 8 (delapan) pernyataan untuk variabel pengawasan diperoleh total skor sebesar 1.898. hal ini menunjukkan bahwa hasil penelitian mengenai pengawasan berkriteria sangat tinggi.

Tabel 5
Interval Y

Kriteria Penilaian	Interval
Sangat Tinggi	1.412,2 – 1.680
Tinggi	1.143,4 – 1.411,2
Sedang	874,6 – 1.142,4 → 1.467
Rendah	605,8 – 873,6
Sangat Rendah	336 – 604,8

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan data hasil kuesioner yang terdiri dari 6 (enam) pernyataan untuk variabel pengawasan diperoleh total skor sebesar 1.467. hal ini menunjukkan bahwa hasil penelitian mengenai pengawasan berkriteria sedang.

Yabel 6
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	,238	2,282	
Pemanfaatan Teknologi Informasi	,135	,104	,188
Partisipasi Penganggaran	,534	,161	,483
Pengawasan	,110	,146	,113

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Sumber : Output SPSS yang diolah, 2020

$$Y = 0,238 + 0,135X_1 + 0,534X_2 + 0,110X_3 + e$$

Dari persamaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Nilai konstanta sebesar 0,238 menyatakan bahwa jika pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi penganggaran dan

pengawasan dianggap tetap atau nol, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa sama dengan nilai konstanta dalam persamaan tersebut yaitu sebesar 0,238

2. Nilai koefisien regresi pemanfaatan teknologi informasi (X1) sebesar 0,135 dan bertanda positif artinya bahwa setiap peningkatan pemanfaatan teknologi informasi maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sebaliknya setiap penurunan variabel pemanfaatan teknologi informasi maka akan menurunkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan (bernilai 0).
3. Nilai koefisien regresi partisipasi penganggaran (X2) sebesar dan bertanda positif artinya bahwa setiap peningkatan partisipasi penganggaran maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sebaliknya setiap penurunan variabel partisipasi penganggaran maka akan menurunkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan (bernilai 0).
4. Nilai koefisien regresi pengawasan (X3) sebesar 0,534 dan bertanda positif artinya bahwa setiap peningkatan pengawasan maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sebaliknya setiap penurunan variabel pengawasan maka akan menurunkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan (bernilai 0).

Hasil Uji Hipotesis

1. Pemanfaatan teknologi informasi (X1) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 1,288 dan t_{tabel} sebesar 1,674 dengan tingkat signifikansi 5% maka t_{hitung} sebesar 1,288 < t_{tabel} sebesar 1,674 dan nilai signifikasinya 0,203 > 0,05 maka H_0 diterima. Hal ini

berarti pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dengan demikian hipotesis tidak terbukti kebenarannya.

2. Partisipasi penganggaran (X2) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 3,323 dan t_{tabel} sebesar 1,674 dengan tingkat signifikansi 5% maka t_{hitung} sebesar 3,323 > t_{tabel} sebesar 1,674 dan nilai signifikasinya 0,002 < 0,05 maka H_0 ditolak. Hal ini berarti pemanfaatan partisipasi penganggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dengan demikian hipotesis yang kedua diterima kebenarannya.
3. Pengawasan (X3) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 0,752 dan t_{tabel} sebesar 1,674 dengan tingkat signifikansi 5% maka t_{hitung} sebesar 0,752 < t_{tabel} sebesar 1,674 dan nilai signifikasinya 0,455 > 0,05 maka H_0 diterima. Hal ini berarti pengawasan tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dengan demikian hipotesis tidak terbukti kebenarannya.

Pembahasan

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Dwi Sapartiningsih, dkk (2018), yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi secara signifikan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa karena perangkat desa di Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka belum memanfaatkan keunggulan dari teknologi informasi dalam pengolahan data secara tepat dan tepat.

Partisipasi penganggaran berpengaruh secara signifikan dengan arah hubungan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengawasan tidak berpengaruh secara signifikan dengan arah yang negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan data hasil kue

4. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil peneliti maka peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini berarti tinggi rendahnya pemanfaatan teknologi informasi tidak akan mempengaruhi tinggi rendahnya akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Partisipasi penganggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya dengan semakin meningkatnya partisipasi penganggaran maka akan semakin meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Pengawasan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini berarti tinggi rendahnya pengawasan tidak akan mempengaruhi tinggi rendahnya akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu :

1. Dalam pemanfaatan teknologi informasi, sebaiknya pemerintah desa dapat lebih meningkatkan kemampuan dan keahlian aparatur desa dengan pelatihan atau sosialisasi mengenai teknologi informasi.
2. Pemerintah desa diharapkan dapat memberi kepercayaan terhadap masyarakat dalam penyusunan APBDes.

Serta dapat menampung aspirasi dari masyarakat khususnya dalam penyusunan APBDes.

3. Masyarakat desa diharapkan dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja perangkat desa khususnya dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBDes.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya, agar dapat memperluas penelitian ini dengan meneliti tentang faktor-faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa yang mana belum dibahas dalam penelitian ini seperti, pelatihan, ketaatan laporan keuangan, transparansi dan kompetensi sumberdaya manusia. Serta peneliti selanjutnya juga bisa menambah sampel atau desa yang akan diteliti.

5. DAFTAR PUSTAKA

Rizkita Andini, 2018. "Pengaruh Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin".

<https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01319350/dana-desa-di-majalengka>.

Diakses pada Selasa, 29 Oktober 2019, Pukul 11.00 WIB.

Suyanto. 2011. Pengaruh Partisipasi Penganggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Publikasi.

Anggraeni, Dian Tri. 2014. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada SKPD di Kabupaten Sidoarjo)". Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi. Vol. 3 No. 3. Hal. 1-16

Sujarweni, Wiranata. 2015. Akuntansi Sektor Publik. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.

Suparman, Wayan Edi. 2014. "Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng." e-Journal S1 Akuntansi. Universitas Pendidikan Ganesha. Volume 2. No. 1. Hal 1-10.

Dwi Sapartiningsih, Suharno, Djoko Kristianyo 2018. "Analisis Pengaruh Kompetensi Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan dan Desa". Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi. Vol. 14 NO. 1 Hal. 100-114 .